

**ETIKOLEGAL PENOLAKAN KARANTINA PADA MASA PANDEMI :
PERTENTANGAN HAL INDIVIDU DAN MASYARAKAT**

**ETIKOLEGAL REJECTION OF QUARANTINE DURING A PANDEMIC:
CONFLICT BETWEEN INDIVIDUALS AND SOCIETY**

**Sonya Airini Batubara, Jefri Natanaill Purba, Jody Setiawan Siregar, Stevan Febriando
Sinaga, Velina Angelica Saragi,**

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia

Email : sonyaairinibatubara@unprimdn.ac.id

Abstrak

Penolakan karantina di zaman pandemi adalah hal yang sangat berbahaya pada saat itu. Untuk hukum di negara Indonesia sendiri, masih kurang tegas dalam menegakkan keadilannya bahkan yang sudah tertulis sekalipun tidak cukup kuat untuk menegaskan keadilan yang ada. Penolakan karantina ini juga kerap kali dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab karena merasa memiliki jabatan yang cukup besar untuk tidak menaati peraturan yang ada. Seperti pada contoh kasus yang kami berikan, penolakan karantina yang dilakukan oleh salah satu *public figure* yang ada justru merugikan banyak pihak, tidak hanya merugikan dirinya sendiri tetapi juga merugikan orang-orang yang membantunya serta masyarakat sekitar. Namun, dia dan rekan-rekannya yang melanggar kekarantinaan ini justru tidak mendapat hukuman yang sepadasnya sedangkan orang-orang yang membantunya untuk melanggar kekarantinaan ini mendapat sanksi yang lebih berat. Tujuan dari penelitian ini, adalah untuk mengetahui penegakan sanksi hukum serta mengetahui etika, hukum dan keadilan terhadap pelaku penolakan karantina. Dan juga sama seperti yang sudah-sudah, hukum yang berlaku bergerak tumpul ke atas dan runcing ke bawah. Etika, hukum dan keadilan adalah hal yang berkesinambungan dan memiliki satu kesatuan yang padu termasuk pada hal penolakan karantina itu sendiri, dimana hak masyarakat, ketentuan hukum dan sifat dasar menolak dan menerima menentukan segala aspek. Menurut temuan penelitian ini, seharusnya untuk pelaku penolakan karantina, dikenakan sanksi yang lebih tegas dan sama rata, tanpa terkecuali agar tidak terjadinya kecemburuhan sosial. Kecemburuhan sosial itu sendiri, sangat merugikan seperti orang-orang yang tidak memiliki kekuasaan atau jabatan yang penting untuk bisa membantunya lari dari tanggungjawab, sedangkan orang-orang yang memiliki kekuasaan dengan tenang kabur begitu saja.

Kata Kunci : Karantina, Pandemi, Hukum, Keadilan

Abstract

The refusal of quarantine in the age of the pandemic was a very dangerous thing at the time. For the law in Indonesia itself, it is still less firm in upholding its justice, even if it is written, it is not strong enough to affirm the existing justice. This quarantine refusal is also often carried out by irresponsible individuals because they feel that they have a large enough position to disobey existing regulations. As in the case we gave, the refusal of quarantine by one of the *existing public figures* actually harmed many parties, not only harming himself but also harming the people who helped him and the surrounding community. However, he and his colleagues who violated this quarantine did not receive the appropriate punishment while the people who helped him to violate this quarantine received more severe sanctions. The purpose of this study is to find out the enforcement of legal sanctions and know the ethics, law and justice of the perpetrators of quarantine rejection. And also just as it has been, the applicable law moves bluntly upwards and pointed downwards. Ethics, law and justice are sustainable things and have a unified unity including the rejection of quarantine itself, where people's rights, legal provisions and the nature of rejecting and accepting determine all aspects. According to the findings of this study, it should be for perpetrators of quarantine denial, to be subject to more strict and equal sanctions, without exception so as not to cause social jealousy. Social jealousy itself, is very detrimental as people who do not have the power or position that is important to be able to help them run away from responsibility, while people who have power calmly run away.

Keywords : Quarantine, Pandemic, Law, Justice